

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis data yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Pandangan Kemenlu RI dan ODC Kedubes Amerika Serikat tentang kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat untuk *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* dalam rangka menyempurnakan latihan PDT di PMPP TNI.

Untuk saat ini, berdasarkan pandangan Kemlu RI belum perlu adanya pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* bagi para pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, dan dalam hal ini pihak ODC Kedubes Amerika Serikat juga mengikuti arah kebijakan dari pihak Indonesia. Namun akan sangat baik, jika penguatan latihan di PMPP TNI lebih berfokus pada materi *counter terrorism* baik *knowledge* maupun *practice*. *Knowledge* yang bersifat *soft skill* seperti manajemen konflik penanganan terorisme, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan yang dapat digunakan dalam merangkul para milisi (*armed group*) agar mau menyerahkan diri tanpa peperangan, serta *practice yang bersifat hard skill* seperti *close combat tactical/PJD* (pertempuran jarak dekat) dan *urban warfare*. Hal ini merupakan nilai substansial yang harus dipenuhi oleh PMPP TNI dalam menyelenggarakan latihan PDT. Materi tersebut merupakan *mandatory* bukan sekedar *supporting system* yang bisa ditambah atau dikurangi, dengan mempertimbangkan kebutuhan (*needs*) para *peacekeeper* dalam rangka mengikuti perkembangan situasi di daerah misi (*the new era in Peacekeeping Operations*).

Menindaklanjuti hal tersebut, maka **pelatihan PDT di PMPP**

TNI seharusnya mengalami perubahan baik substansi materi dalam PDT maupun rentang waktu penyelenggaraan latihan lebih dari satu bulan. PMPP TNI harus memberikan pembekalan materi tentang *counter terrorism* di dalam latihan PDT, baik materi yang bersifat *soft skill (knowledge)* seperti manajemen konflik, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan, maupun materi *hard skill (practice)* seperti *close combat tactical/PJD* dan *urban warfare* dalam mendukung materi OLI maupun patroli sebagai tanggapan atas perkembangan situasi tentang isu ancaman terorisme di daerah misi.

5.1.2. Keuntungan yang diperoleh Indonesia dan Amerika Serikat dengan *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa saat ini belum urgensi adanya pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* bagi para pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, namun dengan adanya *promoting Counter Terrorism in Peacekeeping Operations* sebagai penguatan latihan PDT yang diselenggarakan oleh PMPP TNI untuk persiapan melindungi diri dan masyarakat sipil dari ancaman terorisme, maka keuntungan yang diperoleh adalah menghasilkan *out put* pasukan Garuda yang menguasai pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang mumpuni, sehingga para *peacekeeper* yang diberangkatkan ke daerah misi lebih percaya diri dan tidak memiliki keraguan lagi untuk bertindak di lapangan sehingga diharapkan dapatnya meminimalisir insiden, pelanggaran aturan, dan menjamin keselamatan diri pasukan sendiri. Begitu pula dengan tugas perlindungan masyarakat sipil atau *Protection of Civilian (POC)* akan terlaksana lebih baik, dimana bermuara pada keberhasilan tugas dan akhirnya tertuju pada nama baik bangsa Indonesia di dunia

internasional.

Selain itu, bahwa keuntungan kerja sama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam penyiapan dan pelatihan *peacekeeper* yang diselenggarakan oleh PMPP TNI adalah dapat mempererat hubungan diplomatik dan persahabatan baik antara negara Indonesia dan Amerika Serikat dengan tetap memperhatikan batas-batas kerja sama sesuai dengan standar aturan/norma-norma hukum internasional yang berlaku di PBB dan nilai-nilai kemanusiaan (hak asasi manusia), untuk menghindari bias pelaksanaan selama latihan dan menjaga keamanan rahasia negara Indonesia.

5.2. Saran.

Hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan di atas telah memberikan gambaran yang bersifat menyeluruh tentang bagaimana *promoting Counter Terrorism* sebagai penguatan materi dalam latihan PDT yang harus diselenggarakan oleh PMPP TNI dalam rangka penyempurnaan latihan PDT yang selama ini telah berjalan, hal tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas belum perlunya pembentukan *Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force* untuk menyikapi perkembangan dinamis isu terorisme di daerah misi. Berikut ini beberapa saran yang dapat disumbangkan dari hasil penelitian tersebut mengenai penguatan latihan PDT, yaitu:

5.2.1. Saran Teoritis.

Teori tentang kolaborasi operasi *counter terrorism* dan operasi *peacekeeping* dinilai sangat menarik, karena selama ini dianggap sebagai teori yang berbeda, *counter terrorism* lebih ke *hard approach* dengan langkah offensif dan represifnya, sedangkan *peacekeeping* adalah *soft approach*. Hal tersebut dapat diperkuat oleh Teori Perdamaian John Galtung (1976) yang menyebutkan tentang tiga tahapan pendekatan/penanganan dalam mencapai

perdamaian, yaitu: *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Dimana setiap tahapan tersebut digunakan sesuai pada tingkatan situasi dan kondisi negara yang sedang berkonflik.

Pertama, *peacemaking* mengacu pada usaha-usaha mediasi, negosiasi, dan penyelesaian konflik yang lebih luas. Dalam konteks *counter terrorism*, pendekatan *peacemaking* dapat berfokus pada mengatasi akar penyebab terorisme, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi pada radikalisme.

Kedua, *peacekeeping* melibatkan penggunaan pasukan internasional atau multinasional untuk menjaga gencatan senjata, mengawasi perbatasan, dan menjalankan operasi kemanusiaan. Dalam hal ini *peacekeeping* dapat berfokus pada memelihara keamanan di wilayah yang rentan terhadap ancaman terorisme, mencegah konflik berskala besar, dan memfasilitasi upaya pemberantasan jaringan teroris.

Ketiga, *peacebuilding* adalah suatu proses yang bertujuan untuk membentuk perdamaian dengan cara yang praktis, fokus pada implementasi perubahan sosial secara damai. Ini melibatkan upaya rekonstruksi dan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, sosial, dan ekonomi. Proses ini bertujuan untuk mengatasi akar penyebab konflik, mempromosikan rekonsiliasi, dan membangun fondasi yang kokoh untuk perdamaian berkelanjutan. Dalam konteks *counter terrorism*, *peacebuilding* dapat berfokus pada membangun resiliensi masyarakat terhadap ideologi terorisme, memfasilitasi rekonsiliasi, memperkuat tata pemerintahan yang adil, serta meningkatkan akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja.

Oleh karena itu, penerapan dan pengembangan dari teori perdamaian John Galtung tersebut, dapat menjadi landasan kolaborasi operasi *counter terrorism* dan *peacekeeping* dalam rangka mengembangkan *framework peacekeeping operations* yang berkelanjutan (*sustainable peace*) untuk menghadapi dinamika

perkembangan situasi saat ini, terkait ancaman terorisme yang sewaktu-waktu bisa terjadi di daerah misi dengan dibarengi oleh adanya penguatan mandat (*robust of mandate*).

5.2.2. Saran Praktis.

a. Bagi Kemenlu RI.

Indonesia telah membuktikan janji kampanyenya untuk menjadi mitra sejati dalam perdamaian (*true partner for peace*). Indonesia tidak hanya mengadvokasi kepentingan negara-negara berkembang, melainkan juga berupaya merangsang kesatuan suara di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). Indonesia percaya bahwa tanpa adanya kesepakatan bersama, DK PBB tidak dapat efektif melaksanakan mandatnya untuk memelihara keamanan dan perdamaian dunia dengan baik.

Pada tahun 2019 lalu, Indonesia menjadi Presiden DK PBB mengusung tema “Menabur Benih Perdamaian (*Investing in Peace*)”. Serangkaian kegiatan utama telah dilaksanakan untuk mempromosikan tema dan visi Indonesia tersebut karena Indonesia meyakini bahwa perdamaian harus diupayakan, dirawat, dan dipertahankan agar dapat berkelanjutan.

Keberhasilan ini mencerminkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap keterampilan diplomasi Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dapat terus memperkuat hubungan dengan meningkatkan kemitraan, dialog, dan kerja sama dengan perwakilan negara-negara sahabat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Hal ini bertujuan untuk mendukung peningkatan kapabilitas militer Indonesia secara *soft skill*, *hard skill*, dan *smart skill* melalui program latihan bagi para *peacekeeper* di PMPP TNI.

b. Bagi Mabes TNI. Mabes TNI dalam hal ini PMPP TNI selaku penyelenggara latihan PDT diharapkan dapat menambahkan:

1. Materi *hard skills* dalam mendukung materi OLI maupun patroli, seperti *close combat tactical*//PJD, *urban warfare*, latihan medan (GPS) dengan menggunakan aplikasi *avenga map online* dan *arcgis online*, dan latihan mengemudi APC di jalan tanah perkebunan agar terbiasa menilai medan. Selain itu, dilaksanakan upaya satuan baik program peorangan maupun kelompok tentang materi menembak minimal nilai 65, pendalaman bahasa asing, dan pendukung materi *Counter Terrorism* yaitu C-IED sebagai tanggapan atas serangan bom pada *peacekeeper* yang telah terjadi.
2. Materi *soft skills* seperti manajemen konflik, pengetahuan intelijen daerah misi, dan penggalangan yang bermanfaat secara internal untuk keamanan setiap prajurit dan satuan secara eksternal untuk mendukung kegiatan CIMIC saat di daerah misi.
3. Ditambahkan 1 jabatan sebagai Perwira Intrepetrer bahasa Arab untuk Satgas UNIFIL untuk mendukung komunikasi dengan warga lokal saat di daerah misi, karena di Satgas MINUSCA dan MONUSCO terdapat jabatan Perwira Intrepetrer bahasa Perancis sesuai dengan bahasa lokal yang digunakan di Afrika.
4. Pendalaman materi tentang bahasa Inggris terkhusus bagi pangkat Bintara dan Perwira, hal ini masalah klasik namun masih sering terjadi, akibat komunikasi bahasa Inggris yang lemah berimplikasi terhadap salah paham antara kantor HQ dan unit dari Indobatt.
5. Setiap Satgas UN yang akan diberangkatkan agar dibekali dengan aturan yang lengkap dari Mandat, ROE, STIR, UNIBAM/SUR, dan Rencana Kontigensi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di daerah misi karena tidak memahami hal tersebut.

6. Mengundang dan berkolaborasi dengan pihak/instansi di luar PMPP TNI sebagai narasumber dan pelatih untuk menambah pengetahuan, ketrampilan dan bertukar pengalaman sesuai dengan materi yang akan diberikan kepada peserta latihan.

c. Bagi *peacekeeper* Indonesia. Setiap prajurit TNI yang terpilih menjadi *peacekeeper* adalah prajurit yang sudah memiliki kelebihan saat rekrutmen jika dibandingkan dengan rekan prajurit lainnya, serta prajurit tersebut merupakan prajurit yang memiliki prestasi maupun penghargaan dari Pimpinan TNI atas keberhasilan pelaksanaan tugas di dalam negeri. Oleh karena itu, dia dipercaya mampu melaksanakan tugas misi pemeliharaan perdamaian dunia yang membawa nama baik bangsa Indonesia, sehingga pada saat latihan PDT diharapkan setiap prajurit peka, aktif, responsif, dan tanggap apa yang menjadi tugas sesuai jabatan masing-masing. Apa yang kurang jelas atau tidak dimengerti tentang materi agar menanyakan ke pelatih sampai dengan detail, kemudian materi yang telah diterima dipraktikkan dengan serius dan berulang-ulang sampai dengan menguasai, sehingga pasukan/kontingen Garuda merupakan kumpulan prajurit dengan profesionalisme tinggi yang siap diberangkatkan tugas menjaga perdamaian di bawah bendera PBB.

d. Bagi Univeristas Pertahanan. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat yang berkelanjutan bagi khalayak banyak, termasuk memberikan saran dan masukan bagi kebijakan suatu instansi terkait. Diharapkan setiap penelitian yang telah diselesaikan oleh Mahasiswa Unhan dapat didistribusikan kepada instansi terkait. Hal ini bertujuan untuk memberikan saran dan masukan yang dapat berkontribusi pada perubahan positif di masa depan (*agent of changes*), khususnya terkait dengan permasalahan yang mungkin dihadapi oleh instansi tersebut beserta gambaran solusinya.

